

LEMBAR DISPOSISI
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Indeks :	R	Kode	No. Urut	Tgl. Penyelesaian
	P		936	01/Desem. 2025
	B			

Perihal : Undangan

Asal Surat : <u>Balon perencanaan pembangunan nasional republik Indonesia</u>	Tanggal <u>18/Novem-2025</u>	No. Surat <u>B-21 603 /Dt. b.1 / PP. 04.02/11/2015.</u>	Lampiran
---	---------------------------------	--	----------

Diajukan / diteruskan

Th. Kepala Dinas

11/12

Pengolah :

- ☐ Sekretaris
- ☒ Bid. Cipta Karya
- ☐ Bid. Bina Marga
- ☐ Bid. Tata Ruang
- ☐ UPTD Laboratorium Bahan dan Konstruksi
- ☐ UPTD P2BG
- ☐ UPTD Workshop dan Peralatan
- ☐ UPTD JJ Wil

Instruksi / Informasi

- ☐ Setuju
- ☒ Pertimbangan / Saran
- ☐ Balas
- ☐ Menunggu Disposisi Gubernur
- ☐ Dilaksanakan Segera
- ☐ Bicarakan dengan Kadis
- ☐ Rapatkan dengan Kabid Terkait
- ☐ Monitor dan Pantau
- ☐ Diketahui
- ☐ Pelajari Dan Laporkan
- ☐ Tugaskan / Kirim Petugas
- ☐ Mewakili Kadis
- ☐ Ikut Hadir Bersama Kadis
- ☐ File

Th. Kabid CK

12.25



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : B-21683/Dt.6.1/PP.04.02./11/2025 Jakarta, 18 November 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Undangan

Yth. **(mohon lihat daftar undangan terlampir)**
di Tempat

Pemerintah sejak tahun 2019 melalui kebijakan dana transfer ke daerah telah mengalokasikan DAK tematik *stunting* yang bersifat lintas bidang untuk memberi dukungan pembiayaan kepada Pemerintah Daerah dalam intervensi *stunting*. Dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan DAK tematik *stunting* dan sesuai dengan amanat PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu adanya peningkatan peran Pemerintah Provinsi dalam tata kelola DAK di kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara/i untuk hadir dalam rapat pembahasan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : **Senin – Kamis, 8 - 11 Desember 2025**
Waktu : *(sesuai agenda terlampir)*
Tempat : Hotel Jambuluwuk Malioboro Yogyakarta
Jl. Gajah Mada No.67, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55166
Agenda : Sosialisasi kegiatan DAK Tematik *Stunting* Tahun 2026 dan
Diskusi Terpumpun Peningkatan Peran Provinsi dalam Tata
Kelola DAK Tematik *Stunting* Kabupaten/Kota tahun 2026
Regional I

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara/i atau staf yang mewakili dalam pertemuan tersebut. Pembiayaan akomodasi dan transportasi dibebankan pada DIPA Kementerian PPN/Bappenas melalui hibah Bank Dunia program INEY Fase 2 **untuk 1 orang per OPD**. Mohon Bapak/Ibu dapat mengisi konfirmasi kehadiran pada tautan <https://link.bappenas.go.id/KonfirmasiPeserta-Yogya> **paling lambat hari Rabu, 3 Desember 2025 pukul 21.00 WIB**. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Aisyah (HP: 081224389258) dan Sdri. Hannah (HP: 081220522040)

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat



Diah Lenggogeni

Tembusan:

Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1 Surat Undangan

Nomor : B-21683/Dt.6.1/PP.04.02./11/2025

Tanggal : 18 November 2025

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

A. BAPPEDA PROVINSI

1. Kepala Bappeda Provinsi Aceh
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Bappeda Provinsi Riau
5. Kepala Bappeda Provinsi Jambi
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu
8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
9. Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau
11. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat
13. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah
14. Kepala Bappeda Provinsi DI Yogyakarta
15. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur
16. Kepala Bappeda Provinsi Banten
17. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat
18. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah

B. BPKAD PROVINSI

19. Kepala BPKAD Provinsi Aceh
20. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Utara
21. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat
22. Kepala BPKAD Provinsi Riau
23. Kepala BPKAD Provinsi Jambi
24. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
25. Kepala BPKAD Provinsi Bengkulu
26. Kepala BPKAD Provinsi Lampung
27. Kepala BPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
28. Kepala BPKAD Provinsi Kepulauan Riau
29. Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta
30. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat
31. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah
32. Kepala BPKAD Provinsi DI Yogyakarta
33. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur
34. Kepala BPKAD Provinsi Banten
35. Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Barat
36. Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Tengah

C. DINAS KESEHATAN PROVINSI

37. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
38. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
39. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
40. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
41. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
42. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
43. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
44. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
45. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
46. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
47. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
48. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
49. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
50. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta
51. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
52. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
53. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
54. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

D. DINAS KB PROVINSI (OPD Pengampu Keluarga Berencana)

55. Kepala Dinas KB Provinsi Aceh
56. Kepala Dinas KB Provinsi Sumatera Utara
57. Kepala Dinas KB Provinsi Sumatera Barat
58. Kepala Dinas KB Provinsi Riau
59. Kepala Dinas KB Provinsi Jambi
60. Kepala Dinas KB Provinsi Sumatera Selatan
61. Kepala Dinas KB Provinsi Bengkulu
62. Kepala Dinas KB Provinsi Lampung
63. Kepala Dinas KB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
64. Kepala Dinas KB Provinsi Kepulauan Riau
65. Kepala Dinas KB Provinsi DKI Jakarta
66. Kepala Dinas KB Provinsi Jawa Barat
67. Kepala Dinas KB Provinsi Jawa Tengah
68. Kepala Dinas KB Provinsi DI Yogyakarta
69. Kepala Dinas KB Provinsi Jawa Timur
70. Kepala Dinas KB Provinsi Banten
71. Kepala Dinas KB Provinsi Kalimantan Barat
72. Kepala Dinas KB Provinsi Kalimantan Tengah

E. DINAS PU CIPTA KARYA PROVINSI (OPD Pengampu Air Minum/Sanitasi)

73. Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Aceh
74. Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara
75. Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Barat
76. Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Riau
77. Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jambi
78. Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan
79. Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Bengkulu
80. Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Lampung

81. Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
82. Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Kepulauan Riau
83. Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi DKI Jakarta
84. Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Barat
85. Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
86. Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi DI Yogyakarta
87. Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
88. Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Banten
89. Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Kalimantan Barat
90. Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Kalimantan Tengah

Lampiran 2 Surat Undangan

Nomor : B-21683/Dt.6.1/PP.04.02./11/2025

Tanggal : 18 November 2025

Agenda Rapat
Sosialisasi kegiatan DAK Tematik *Stunting* Tahun 2026 dan Diskusi
Terpumpun Peningkatan Peran Provinsi dalam Tata Kelola DAK Tematik
***Stunting* Kabupaten/Kota tahun 2026 Regional I**

Hari/Jam	Topik/Tema	Narasumber
Hari ke-1: Senin, 8 Desember 2025		
14.00 – 16.00 WIB	Registrasi dan <i>check-in</i>	
16.00 – 18.00 WIB	Persiapan dan penyampaian informasi DAK ke peserta	
18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	
19.00 – 20.00 WIB	Pembukaan dan pengantar: Kebijakan DAK tematik <i>Stunting</i> tahun 2026	Direktur KGM Bappenas
Hari ke-2: Selasa, 9 Desember 2025		
08.30-09.00 WIB	Registrasi	
09.00-09.20 WIB	Pembukaan oleh MC	
09.20-10.20 WIB	Pemaparan panelis sesi 1: (@ 20 menit) 1. Kebijakan DAK Tematik Tahun 2026 2. Kebijakan Pengalokasian DAK Fisik/Nonfisik tahun 2026 3. Peran Pemerintah Provinsi dalam Tata Kelola DAK Kabupaten/Kota	1. Dit. PKDTKD, Bappenas 2. Dit. DTK, Kemenkeu 3. Dit. FTPUD, Kemendagri
10.20-10.30 WIB	<i>Coffee break</i>	
10.30-12.00 WIB	Diskusi dan tanya/jawab	
12.00-13.30 WIB	ISHOMA	
13.30-14.30 WIB	Pemaparan panelis sesi 2: (@ 20 menit) 1. Informasi Kebijakan dan Kegiatan DAK Fisik dan Nonfisik Bidang Kesehatan tahun 2026. 2. Informasi Kebijakan dan Kegiatan DAK Nonfisik Bidang KB tahun 2026. 3. Informasi Kebijakan dan Kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum dan Bidang Sanitasi tahun 2026.	1. Roren, Kemenkes 2. Roren, BKKBN 3. PFID, Kemen PU
14.30-16.00 WIB	Diskusi dan tanya/jawab	
16.00-16.10 WIB	<i>Coffee break</i>	
16.10-16.50 WIB	<i>Briefing</i> dan penjelasan pembagian diskusi kelompok	Fasilitator
16.50-17.00 WIB	Penutupan Hari I	
Hari ke-3: Rabu, 10 Desember 2025		
08.30-09.00 WIB	Registrasi	
09.00-09.15 WIB	Pembukaan oleh MC	
09.15-10.45 WIB	Diskusi Kelompok OPD Lintas Provinsi (<i>Reflecting and Cross Learning</i>) Peran Provinsi dalam tata kelola DAK Kab./Kota	Fasilitator
10.45-10.50 WIB	<i>Coffee Break</i>	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hari/Jam	Topik/Tema	Narasumber
10.50-12.00 WIB	Lanjutan Diskusi Kelompok OPD Lintas Provinsi (<i>Reflecting and Cross Learning</i>) Peran Provinsi dalam tata kelola DAK Kab./Kota	Fasilitator
12.00-13.30 WIB	ISHOMA	
13.30-15.30 WIB	Presentasi hasil diskusi kelompok (Pleno) (@ 30 menit)	Fasilitator
15.30-16.45 WIB	Diskusi dan tanya jawab	Fasilitator
16.45-17.00 WIB	Penutupan Hari 2	Dit. KGM Bappenas
Hari ke-4: Kamis, 11 Desember 2025		
08.30-09.00 WIB	Registrasi	
09.00-10.00 WIB	<i>Wrap up</i> dan simpulan hasil diskusi kelompok	Dit. KGM Bappenas
10.00-10.30 WIB	Penutup	Dit. KGM Bappenas
10.30-12.00 WIB	Penyelesaian administrasi peserta	

Lampiran 3 Surat Undangan

Nomor : B-21683/Dt.6.1/PP.04.02./11/2025

Tanggal : 18 November 2025

KETENTUAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Sosialisasi kegiatan DAK Tematik *Stunting* Tahun 2026 dan Diskusi
Terpumpun Peningkatan Peran Provinsi dalam Tata Kelola DAK Tematik
***Stunting* Kabupaten/Kota tahun 2026**

A. Umum

1. Peserta diwajibkan mengikuti acara dari awal hingga akhir;
2. Peserta hadir sesuai tanggal dalam undangan terlampir;
3. Peserta diwajibkan mengisi formulir konfirmasi kehadiran untuk Regional I: **paling lambat hari Rabu, 3 Desember 2025 pukul 21.00 WIB**, dengan menyertakan tanggal check-in dan check-out;
4. Peserta yang telah mengisi link konfirmasi kehadiran, namun tidak hadir, maka panitia akan menagihkan biaya akomodasi kepada peserta;
5. Peserta yang memberikan konfirmasi melewati batas (Rabu, 3 Desember 2025 pukul 21.00 WIB untuk Regional I) maka seluruh biaya ditanggung oleh pembiayaan mandiri;
6. Waktu pelaksanaan kegiatan yaitu 8-11 Desember 2025 untuk Regional I. Panitia hanya menanggung pembiayaan akomodasi dan transportasi sesuai tanggal dan lokasi kegiatan.

B. Tata tertib

1. Panitia **menyediakan penginapan/akomodasi** dengan detail sebagai berikut:
Regional I
 - a. *Check In* kamar: 8 Desember 2025, Pukul 14.00 WIB
 - b. *Check Out* kamar: 11 Desember 2025 Pukul 12.00 WIB
 - c. Satu kamar berisikan 2 orang
2. Pada saat registrasi, peserta **wajib** menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat tugas yang sudah ditandatangani dan dicap dengan kop surat Dinas/Instansi (asli);
 - b. *print out* tiket pesawat/kereta pergi dan pulang;
 - c. *boarding pass* berangkat untuk yang menggunakan pesawat / kereta api;
 - d. bukti *transport* bandara asal dan tujuan (asli);
 - e. untuk peserta yang tidak menggunakan pesawat, dapat menyertakan bukti tiket/kwitansi asli angkutan umum lain yang digunakan.
3. Panitia menanggung biaya paket pertemuan *fullboard*, penggantian biaya transportasi dan uang harian yang sesuai dengan SBM Tahun 2025 yang bersumber dari dana hibah *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. harga tiket pesawat PP tidak melebihi pagu SBM tahun 2025. Bagi yang menggunakan kereta api, tidak menggunakan kereta api *Luxury*, bagi yang menggunakan kereta cepat tidak menggunakan kereta cepat *first class*, dan untuk taksi dari bandara ke tujuan (Hotel) tidak menggunakan kelas Golden/Silver;
 - b. untuk kwitansi/tiket hanya berlaku untuk satu kali perjalanan dan biaya taxi dari kantor ke bandara di daerah serta taksi dari bandara/stasiun ke tujuan (Hotel) melampirkan bukti-bukti pengeluaran untuk transportasi dengan tidak melebihi pagu SBM 2025;
 - c. biaya perjalanan akan ditransfer langsung ke rekening peserta sesuai nomor rekening pada registrasi peserta (Nama Bank, No Rekening, Nama pada rekening).
4. Panitia tidak menanggung biaya telepon, *laundry*, sopir pribadi/keluarga, pengeluaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pribadi lain, dan makanan selain yang disediakan oleh panitia.

5. Seluruh peserta diharapkan membawa laptop, dokumen administrasi yang diperlukan, obat-obatan pribadi, serta berperan aktif dalam mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal sampai selesai.
6. Informasi lebih lanjut terkait administratif, dapat menghubungi:
 - Sdri. Chandra (+62 812-9726-3864)
 - Sdr. Willy (+62812-9133-1233)

Lampiran 4 Surat Undangan

Nomor : B-21683/Dt.6.1/PP.04.02./11/2025

Tanggal : 18 November 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

Sosialisasi kegiatan DAK Tematik *Stunting* Tahun 2026 dan Diskusi Terpumpun Peningkatan Peran Provinsi dalam Tata Kelola DAK Tematik *Stunting* Kabupaten/Kota tahun 2026

I. LATAR BELAKANG

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah lima tahun (Balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Upaya percepatan penurunan *stunting* di Indonesia yang dilaksanakan melalui Program *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) Phase-1 tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, telah berhasil menurunkan Prevalensi *Stunting* dari 30,8% pada tahun 2018 (Riskesdas 2018), menjadi 19,8% pada tahun 2024 (SSGI 2024) atau terjadi penurunan sebesar 11,0% selama kurun waktu 6 tahun. Meskipun demikian *Stunting* masih akan menjadi isu penting dalam pembangunan di Indonesia, dengan telah ditetapkan target prevalensi *Stunting* menjadi 14,4% di tahun 2029 (RPJMN tahun 2025-2029).

Penyebab *Stunting* yang kompleks dan multikausal membutuhkan intervensi lintas sektor terintegrasi pada sasaran yang sama. Intervensi *Stunting* tidak hanya merupakan kegiatan Kementerian/Lembaga melalui belanja pusat, namun juga merupakan kegiatan Pemerintah Daerah melalui belanja daerahnya. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, maka sumber pembiayaan dalam upaya Penurunan *Stunting* mengikuti skema pembiayaan pemerintah yang sudah ada, baik berasal dari Dana Kabupaten/Kota (APBD Kabupaten/Kota), Dana Desa (APBDes), Dana Provinsi (APBD provinsi), Belanja Kementerian/Lembaga (APBN), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun pendapatan lainnya yang sah.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan DAK tematik *stunting* tahun 2026 dan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dipandang perlu adanya peningkatan peran Pemerintah Provinsi dalam mekanisme tata kelola DAK tematik *Stunting* di kabupaten/kota yang ada di wilayahnya

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik

III. TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya Sosialisasi kegiatan DAK Tematik *Stunting* Tahun 2026 dan Diskusi Terpumpun Peningkatan Peran Provinsi dalam Tata Kelola DAK Tematik *Stunting* Kabupaten/Kota tahun 2026 ini adalah:

1. Pemerintah Provinsi mendapat sosialisasi mengenai kebijakan dan struktur menu DAK tematik *stunting* tahun 2026.
2. Pemerintah Provinsi mendapat informasi mengenai data menu, rincian menu, dan alokasi DAK tematik *stunting* tahun 2026 masing-masing kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.
3. Pemerintah Provinsi memahami perannya dalam tata kelola DAK di kabupaten/kota sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2017.

IV. METODOLOGI

Diskusi ini dilaksanakan diawali dengan penjelasan kebijakan DAK tematik *stunting*

tahun 2026 oleh Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas, dilanjutkan dengan pemaparan narasumber dari KL mengenai regulasi dan kebijakan DAK per bidang serta dilanjutkan dengan Diskusi Kelompok OPD Lintas Provinsi.

V. KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dari pertemuan ini adalah Pemerintah Provinsi memahami kebijakan dan struktur menu DAK tematik stunting, regulasi yang mengatur tentang peran provinsi dalam tata kelola DAK dan diharapkan Pemerintah Provinsi dapat lebih meningkatkan perannya dalam tata kelola DAK kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan Sosialisasi kegiatan DAK Tematik Stunting Tahun 2026 dan Diskusi Terpumpun Peningkatan Peran Provinsi dalam Tata Kelola DAK Tematik Stunting Kabupaten/Kota tahun 2026 dibagi menjadi 2 (dua) regional sebagai berikut:

1. Regional I :

Hari/Tanggal : Senin-Kamis, 8-11 Desember 2025

Tempat : Kota Yogyakarta

2. Regional II:

Tanggal : Selasa-Jum'at, 16-19 Desember 2025

Tempat : Kota Balikpapan

VII. NARASUMBER DAN PESERTA

A. Peserta Pusat terdiri atas:

1. Kementerian PPN/BAPPENAS
2. Kementerian Keuangan
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian Kesehatan
5. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
6. Kementerian Pekerjaan Umum

B. Peserta Provinsi :

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Keluarga Berencana (OPD Pengampu KB)
5. Dinas PU Cipta Karya (OPD Pengampu Air Minum/Sanitasi)

Daftar Pemerintah Provinsi yang diundang dalam rapat Sosialisasi kegiatan DAK Tematik Stunting Tahun 2026 dan Diskusi Terpumpun Peningkatan Peran Provinsi dalam Tata Kelola DAK Tematik Stunting Kabupaten/Kota tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Regional I

1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Sumatera Barat
4. Provinsi Riau
5. Provinsi Jambi
6. Provinsi Sumatera Selatan
7. Provinsi Bengkulu
8. Provinsi Lampung
9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Provinsi Kepulauan Riau
11. Provinsi DKI Jakarta
12. Provinsi Jawa Barat
13. Provinsi Jawa Tengah
14. Provinsi DI Yogyakarta
15. Provinsi Jawa Timur
16. Provinsi Banten

17. Provinsi Kalimantan Barat
18. Provinsi Kalimantan Tengah

Regional II

1. Provinsi Bali
2. Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Provinsi Kalimantan Selatan
5. Provinsi Kalimantan Timur
6. Provinsi Kalimantan Utara
7. Provinsi Sulawesi Utara
8. Provinsi Sulawesi Tengah
9. Provinsi Sulawesi Selatan
10. Provinsi Sulawesi Tenggara
11. Provinsi Gorontalo
12. Provinsi Sulawesi Barat
13. Provinsi Maluku
14. Provinsi Maluku Utara
15. Provinsi Papua Barat
16. Provinsi Papua
17. Provinsi Papua Pegunungan
18. Provinsi Papua Selatan
19. Provinsi Papua Tengah
20. Provinsi Papua Barat Daya

VIII. AGENDA PERTEMUAN

Agenda Rapat Regional I

Hari/Jam	Topik/Tema	Narasumber
Hari ke-1: Senin, 8 Desember 2025		
14.00 – 16.00 WIB	Registrasi dan <i>check-in</i>	
16.00 – 18.00 WIB	Persiapan dan penyampaian informasi DAK ke peserta	
18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	
19.00 – 20.00 WIB	Pembukaan dan pengantar: Kebijakan DAK tematik Stunting tahun 2026	Direktur KGM Bappenas
Hari ke-2: Selasa, 9 Desember 2025		
08.30-09.00 WIB	Registrasi	
09.00-09.20 WIB	Pembukaan oleh MC	
09.20-10.20 WIB	Pemaparan panelis sesi 1: (@ 20 menit) 1. Kebijakan DAK Tematik Tahun 2026 2. Kebijakan Pengalokasian DAK Fisik/Nonfisik tahun 2026 3. Peran Pemerintah Provinsi dalam Tata Kelola DAK Kabupaten/Kota	1. Dit. PKDTKD, Bappenas 2. Dit. DTK, Kemenkeu 3. Dit. FTPUD, Kemendagri
10.20-10.30 WIB	<i>Coffee break</i>	
10.30-12.00 WIB	Diskusi dan tanya/jawab	
12.00-13.30 WIB	ISHOMA	
13.30-14.30 WIB	Pemaparan panelis sesi 2: (@ 20 menit) 1. Informasi Kebijakan dan Kegiatan DAK Fisik dan Nonfisik Bidang Kesehatan tahun 2026. 2. Informasi Kebijakan dan Kegiatan DAK Nonfisik Bidang KB tahun 2026.	1. Roren, Kemenkes 2. Roren, BKKBN

Hari/Jam	Topik/Tema	Narasumber
	3. Informasi Kebijakan dan Kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum dan Bidang Sanitasi tahun 2026.	3. PFID, Kemen PU
14.30-16.00 WIB	Diskusi dan tanya/jawab	
16.00-16.10 WIB	<i>Coffee break</i>	
16.10-16.50 WIB	<i>Briefing</i> dan penjelasan pembagian diskusi kelompok	Fasilitator
16.50-17.00 WIB	Penutupan Hari I	
Hari ke-3: Rabu, 10 Desember 2025		
08.30-09.00 WIB	Registrasi	
09.00-09.15 WIB	Pembukaan oleh MC	
09.15-10.45 WIB	Diskusi Kelompok OPD Lintas Provinsi (<i>Reflecting and Cross Learning</i>) Peran Provinsi dalam tata kelola DAK Kab./Kota	Fasilitator
10.45-10.50 WIB	<i>Coffee Break</i>	
10.50-12.00 WIB	Lanjutan Diskusi Kelompok OPD Lintas Provinsi (<i>Reflecting and Cross Learning</i>) Peran Provinsi dalam tata kelola DAK Kab./Kota	Fasilitator
12.00-13.30 WIB	ISHOMA	
13.30-15.30 WIB	Presentasi hasil diskusi kelompok (Pleno) (@ 30 menit)	Fasilitator
15.30-16.45 WIB	Diskusi dan tanya jawab	Fasilitator
16.45-17.00 WIB	Penutupan Hari 2	Dit. KGM Bappenas
Hari ke-4: Kamis, 11 Desember 2025		
08.30-09.00 WIB	Registrasi	
09.00-10.00 WIB	<i>Wrap up</i> dan simpulan hasil diskusi kelompok	Dit. KGM Bappenas
10.00-10.30 WIB	Penutup	Dit. KGM Bappenas
10.30-12.00 WIB	Penyelesaian administrasi peserta	

Agenda Rapat Regional II

Hari/Jam	Topik/Tema	Narasumber
Hari ke-1: Selasa, 16 Desember 2025		
14.00 – 16.00 WITA	Registrasi dan <i>check-in</i>	
16.00 – 18.00 WITA	Persiapan dan penyampaian informasi DAK ke peserta	
18.00 – 19.00 WITA	ISHOMA	
19.00 – 20.00 WITA	Pembukaan dan pengantar: Kebijakan DAK tematik Stunting tahun 2026	Direktur KGM Bappenas
Hari ke-2: Rabu, 17 Desember 2025		
08.30-09.00 WITA	Registrasi	
09.00-09.20 WITA	Pembukaan oleh MC	
09.20-10.20 WITA	Pemaparan panelis sesi 1: (@ 20 menit) 1. Kebijakan DAK Tematik Tahun 2026	1. Dit. PKDTKD, Bappenas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hari/Jam	Topik/Tema	Narasumber
	2. Kebijakan Pengalokasian DAK Fisik/Nonfisik tahun 2026 3. Peran Pemerintah Provinsi dalam Tata Kelola DAK Kabupaten/Kota	2. Dit. DTK, Kemenkeu 3. Dit. FTPUD, Kemendagri
10.20-10.30 WITA	<i>Coffee break</i>	
10.30-12.00 WITA	Diskusi dan tanya/jawab	
12.00-13.30 WITA	ISHOMA	
13.30-14.30 WITA	Pemaparan panelis sesi 2: (@ 20 menit) 1. Informasi Kebijakan dan Kegiatan DAK Fisik dan Nonfisik Bidang Kesehatan tahun 2026. 2. Informasi Kebijakan dan Kegiatan DAK Nonfisik Bidang KB tahun 2026. 3. Informasi Kebijakan dan Kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum dan Bidang Sanitasi tahun 2026.	1. Roren, Kemenkes 2. Roren, BKKBN 3. PFID, Kemen PU
14.30-16.00 WITA	Diskusi dan tanya/jawab	
16.00-16.10 WITA	<i>Coffee break</i>	
16.10-16.50 WITA	<i>Briefing</i> dan penjelasan pembagian diskusi kelompok	Fasilitator
16.50-17.00 WITA	Penutupan Hari I	
Hari ke-3: Kamis, 18 Desember 2025		
08.30-09.00 WITA	Registrasi	
09.00-09.15 WITA	Pembukaan oleh MC	
09.15-10.45 WITA	Diskusi Kelompok OPD Lintas Provinsi (<i>Reflecting and Cross Learning</i>) Peran Provinsi dalam tata kelola DAK Kab./Kota	Fasilitator
10.45-10.50 WITA	<i>Coffee Break</i>	
10.50-12.00 WITA	Lanjutan Diskusi Kelompok OPD Lintas Provinsi (<i>Reflecting and Cross Learning</i>) Peran Provinsi dalam tata kelola DAK Kab./Kota	Fasilitator
12.00-13.30 WITA	ISHOMA	
13.30-15.30 WITA	Presentasi hasil diskusi kelompok (Pleno) (@ 30 menit)	Fasilitator
15.30-16.45 WITA	Diskusi dan tanya jawab	Fasilitator
16.45-17.00 WITA	Penutupan Hari 2	Dit. KGM Bappenas
Hari ke-4: Jumat, 19 Desember 2025		
08.30-09.00 WITA	Registrasi	
09.00-10.00 WITA	<i>Wrap up</i> dan simpulan hasil diskusi kelompok	Dit. KGM Bappenas
10.00-10.30 WITA	Penutup	Dit. KGM Bappenas
10.30-12.00 WITA	Penyelesaian administrasi peserta	

IX. KISI-KISI PEMAPARAN NARASUMBER

A. Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah

- Kebijakan Perencanaan DAK tahun 2026
- Koridor dan konsep DAK dalam RPJMN 2025-2029 dan DAK Jangka Menengah
- Proyeksi kebijakan dana transfer hingga tahun 2029
- Refleksi kebijakan dan pelaksanaan DAK tahun sebelumnya

B. Direktorat Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan

- Kebijakan pengalokasian dan distribusi anggaran DAK tahun 2026
- Mekanisme penatakelolaan anggaran DAK Fisik dan Non Fisik 2026
- Proyeksi kebijakan dana transfer hingga tahun 2029
- Skema monitoring evaluasi dan pelaporan DAK Fisik dan Non Fisik
- Potensi peran Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan DAK di tingkat Kab/Kota
- Refleksi kebijakan DAK tahun sebelumnya

C. Direktorat Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Kementerian Dalam Negeri

- Kebijakan penatakelolaan anggaran bersumber DAK di tingkat Daerah
- Peran Pemerintah Provinsi dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
- Peran Pemerintah Provinsi dalam perencanaan dan pelaksanaan DAK Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2017
- Arah penguatan peran Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan DAK di tingkat Kab/Kota

D. Kementerian Teknis (Kemenkes, Kemen PU dan BKKBN) :

- Arah kebijakan DAK fisik dan/atau non fisik perbidang
- Sasaran, indikator dan target output
- Jenis, menu dan rincian menu DAK fisik dan/atau nonfisik
- Kriteria lokasi/daerah prioritas
- Distribusi alokasi anggaran DAK tahun 2026 di tiap provinsi
- Mekanisme pemantauan dan pelaporan
- Potensi peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan DAK di tingkat kab/kota

X. Penyelenggara

Seluruh pembiayaan kegiatan ini dibiayai oleh hibah Bank Dunia melalui program INEY Fase 2 dan dibebankan pada DIPA Kementerian PPN/Bappenas, sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku.